

# ANALISA TENTANG PENYERANGAN KANTOR / MARKAS POLRI OLEH MASYARAKAT

Oleh : Brigjen Pol. Drs. Sjachroedin ZPA SH  
(Sabli Kapolri Bidang Manajemen)

## PENDAHULUAN

Dalam era reformasi yang sedang kita hadapi dan dengan lepasnya Polri dari ABRI sejak tanggal 1 April 1999 di mana saat ini berada dibawah Denhankam, maka menyongsong Polri Mandiri yang diharapkan dapat dilaku-

k a n  
p a d a  
t a n g g a l  
1 A p r i l  
2 0 0 0 ,  
P i m -  
p i n a n  
P o l r i  
t e l a h  
m e n y u -  
s u n  
k o n s e p -  
k o n s e p  
d a n

rencana serta agenda kegiatan agar tidak mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

Salah satu upaya yang sedang

dilaksanakan di setiap Polda adalah masalah Kat Yan Mas Polri, dimana sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Sekp. 1320/VIII/1998 tanggal 31 Agustus 1998 tentang Buku Petunjuk Lapangan pelayanan masyarakat oleh Polri dan juga Surat Telegram Kapolri

No. Pol.  
ST/460/  
1999/  
tanggal 14  
Juli 1999  
tentang  
perintah  
kepada  
p a r a  
Kapolda -  
Kapolda  
u n t u k  
m e n y u s u n  
k o n s e p  
u m u m



kebijaksanaan Polda masing-masing dalam rangka kegiatan peningkatan pelayanan masyarakat oleh Polri di seluruh Indonesia.

Masalah pelayanan Polri kepada masyarakat saat ini menjadi perhatian dan sasaran yang penting, mengingat dari fakta-fakta di lapangan masih banyak perbuatan yang tidak simpatik yang dilakukan oleh anggota Polri dan bahkan sampai terjadi adanya penyerangan-penyerangan dari masyarakat terhadap kantor-kantor/Markas Polri yang diakibatkan oleh kurangnya komunikasi maupun adanya sifat-sifat arogansi dari petugas Polri.

Polisi sedang menghadapi ujian yang sangat berat dimana hal ini ditandai adanya krisis dalam segala dimensi kehidupan bermasyarakat, hal ini terlihat antara lain bukan hanya terdapat perusakan-perusakan terhadap Kantor Polri saja tetapi juga munculnya bentuk gangguan Kamtibmas yang bersifat masal dan anarkhis sehingga mengancam integritas dan kesatuan bangsa, kita lihat korban-korban yang tewas, luka berat dan ringan serta kerugian harta benda yang cukup banyak di berbagai daerah di Indonesia seperti peristiwa Mei 1998 di Jakarta, Sambas, Ambon dan lain-lain.

Oleh karena itu dalam menyongsong Polri Mandiri, kita harapkan hal-hal yang tidak menguntungkan terhadap tugas-tugas Polri dimasa lalu tidak akan pernah terulang dan diharapkan agar

Polri benar-benar akan mendapat dukungan serta simpati dari masyarakat berkaitan dengan proses kemandirian Polri yang profesional sebagai dambaan seluruh bangsa Indonesia pada umumnya.

#### FAKTA-FAKTA

Adapun beberapa data dan fakta yang menyangkut penyerangan dan pengrusakan Markas-markas Kepolisian antar lain :

##### **Polda Jabar**

Dari data-data yang ada, maka beberapa Markas Kantor Polisi yang dirusak dan diserang oleh massa antara lain :

Polres Tasikmalaya dan Polsek jajarannya terjadi pada tanggal 26 Desember 1996.

Polsek Pelabuhan Ratu Sukabumi terjadi pada tanggal 3 Agustus 1997.

Polsek Pemeungpeuk Garut tanggal 31 Agustus 1997.

Pos Pol Parakan Muncang Cicalengka tanggal 1 Desember 1998

Polsek Surafe Sukabumi tanggal 20 Desember 1998

Polsek Karawang pada tanggal 31 Desember 1998

## **Polda Jatim**

Untuk Polda Jatim beberapa data antara lain :

Polsekta Lakarsantri Surabaya Selatan dibakar oleh massa pada tanggal 2 Agustus 1998.

Polsek Semampir Surabaya Utara pada tanggal 14 Oktober 1998

Polsek Semen Polres Kediri pada bulan Januari 1999

Mapolsek Paiton, Polres Probolinggo oleh warga masyarakat pada tanggal 8 Januari 1999

Polsek Tumbulu, Polres Jember pada tanggal 8 Januari 1999.

## **Polda Jateng**

Pada hari Senin tanggal 28 Desember 1998 sebanyak 200 orang warga masyarakat Desa Benda Cilumuk Padang Jaya, Culopandang dan Padang sari telah melakukan perusakan pada Polsek Majenang. Selain itu juga terjadi perusakan pada Polsek Kedung Reja Jajaran Polres Cilacap.

## **Polda Metro Jaya**

Telah terjadi pengrusakan pada Polsek Ciracas Jakarta Timur pada tanggal 16 Mei 1997.

## **Polda Lampung**

Untuk periode tahun 1998 di jajaran Kepolisian Daerah Lampung terjadi perusakan dan penghancuran Kantor Markas Kepolisian sebanyak 6 buah yaitu :

Polsek Bahuga, Polres Lampung Utara

Polsek Pagelaran, Polres Lampung Selatan

Polsek Sidomulyo, Polres Lampung Selatan

Pos Polisi Fajar Bulan, Polres Lampung Tengah

Pos Polisi Puralaksana, Polres Lampung Barat

Polsek Way Jepara, Polres Lampung Tengah.

## **Polda Nusa Tenggara Barat**

Pada tanggal 31 Desember 1998 telah terjadi perusakan-perusakan di Polsek Janapria Polres Lombok Tengah sehingga atap genting hancur dan kaca-kaca pecah dan ruangan-ruangan dirusak.

Selain dari pada itu Kapolri Jenderal Polisi Drs. Roesmanhadi,SH dalam

acara jumpa pers evaluasi terhadap situasi Kamtibmas akhirtahun di Mabes Polri tanggal 31 Desember 1998, bahwa pada tahun 1998 telah terjadi perusakan terhadap Kantor Markas Polri di seluruh Indonesia sebanyak 86 buah, bahkan dalam penjelasan Kapolri juga mengatakan bahwa selain perusakan-perusakan terhadap Markas/kantor Polisi terdapat pula anggota Polri yang dianiaya dan bahkan menjadi korban.

### ANALISA / DISKUSI

Dengan begitu pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal ini isangat berpengaruh pula kepada semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia juga yang menyangkut budaya. Tuntutan-tuntutan masyarakat yang menyangkut Keadilan, HAM, Demokrasi dan lain-lain perlu dicermati dan dihadapi oleh setiap anggota Polri dengan arif serta bijaksana namun tegas, yang penting harus berpijak dan berlandaskan hukum dalam setiap penanganan kasua-kasus yang mengganggu Kamtibmas di seluruh wilayah negara Kesatuan RI.

Dari fakta-fakta yang didapatkan baik melalui laporan dari Polda-polda, media massa dan televisi, selain adanya perbuatan-perbuatan anggota Polri itu sendiri yang melakukan tindakan-

tindakan tercela dan merugikan nama baik Polri juga adanya korban-korban jiwa dari anggota Polri sebagai akibat kelalaian, kecerobohan dan kurangnya profesionalisme Kepolisian sehingga menimbulkan kerugian bagi nama baik Polri itu sendiri.

Berdasarkan analisa dan evaluasi serta pengumpulan data-data dilapangan terhadap beberapa Polres dan Polsek yang mengalami pengrusakan dan penyerangan oleh masyarakat, maka penyebab timbulnya masalah tersebut disebabkan oleh faktor Intern dan faktor Ekstern.

#### Faktor Intern

##### Petugas Polri yang simpatik dan arogan

Dalam pelaksanaan tugas sehari - hari masih banyak terlihat anggota Polri yang bersikap kasar dan cenderung menunjukkan kekuasaannya serta sering mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan antipati dari masyarakat terhadap Polri dan apabila ada pihak-pihak yang menghasut maka akan dengan mudah masyarakat terpicu untuk melawan petugas-petugas Polri dan merusak Markas/Kantor Polri. Sebenarnya dalam menangani kasus-kasus yang perlu diketahui oleh setiap anggota Polri adalah bagaimana

menemukan dan mencari akar permasalahan dari kasus tersebut. Karena kejadian yang muncul kadang-kadang hanya merupakan satu gejala saja dan belum merupakan akar masalah dengan tidak melupakan unsur-unsur 7 KAH (SI ADI DEMEN BABI) sehingga dapat merumuskan dan menentukan langkah-langkah yang harus diambil dengan berpegang kepada motto **Love Humanity, Help Delinquency and Fight Crime.**

#### Lambannya penanganan kasus

Sebagai akibat kurang profesionalismenya anggota Polri di lapangan, banyak kasus-kasus yang terjadi, khususnya yang menjadi sorotan dan perhatian masyarakat luas kurang tertangani dengan baik dan cepat. Sehingga hal-hal seperti inilah yang sering menimbulkan opini masyarakat yang tak baik dan mudah di "Blow-up" dengan berbagai interest oleh kelompok tertentu.

Apalagi informasi ini akan mudah diketahui oleh masyarakat apabila disiarkan melalui mass media seperti : TV, Internet, Radio Swasta/RRI yang dapat membentuk opini masyarakat yang akhirnya dapat menyulut emosi massa terhadap kasus tertentu.

Dalam hal ini sering terkesan oleh masyarakat bahwa penyelesaian kasus-

kasus selain lambat, juga berbelit-belit dan kurang transparan, sehingga masyarakat malas dan enggan melapor kepada Polri. Apalagi sering didengar pameo : "**Lapor Kambing Hilang Kerbau**".

#### Lemahnya fungsi Intel dan Bimmas.

Selain itu terhadap fungsi intel terutama yang menyangkut penyelidikan dan penggalangan sudah mulai terlupakan dan bahkan cukup banyak anggota Polri yang tidak tahu bahkan tidak mau tahu bahwa mereka seharusnya secara sadar harus memasang mata dan telinga untuk monitor situasi yang terjadi dan berkembang di masyarakat.

Peranan Bimmas juga sudah kurang dilaksanakan terutama 3S (**Senyum, Sapa dan Salam**) dan kegiatan sambang-sambang. Anjansana serta tatap muka kepada tokoh - masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat serta tokoh-tokoh pemuda dan masyarakat lainnya, yang mengakibatkan kurang dan lemahnya informasi yang masuk sehingga berakibat kepada kurang tajamnya daya analisis terhadap perkembangan situasi lingkungan dan kurang kemampuan untuk mengidentifikasi masalah yang dapat berakibat status Polri tersebut selalu berada pada posisi yang sering terdesak apabila berhadapan dengan tantangan.

hambatan dan gangguan.

### **Faktor Komandan / Pemimpin**

Seorang Komandan, Pemimpin dari satu Kesatuan merupakan satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan komandonya. Banyak pimpinan yang mempunyai tipe "Safety Player" dengan ciri ragu-ragu dan tidak berani mengambil keputusan yang mengandung resiko terutama pada situasi kritis yang diperlukan ketegasan dan keputusan seorang komandan. Mereka cenderung hanya membiarkan pimpinan bawahan untuk mengatasi masalah kritis tanpa memberi arahan dan komando yang jelas dan tegas. Akibatnya bawahan tidak mempunyai pegangan kuat dalam menentukan alternatif pemecahan masalah sehingga sering keliru atau apatis dan membiarkan masalah berkembang tanpa tindakan tegas.

Selain itu hal-hal yang dapat menurunkan semangat anggota dan merusak kesatuan adalah "Faktor Keberpihakan" dari seorang komandan terhadap penyelesaian suatu kasus yang disebabkan oleh karena adanya imbalan, famili, teman dekat dan lain-lain.

### **Kurang kekuatan Cadangan**

Kekuatan cadangan sebagai kekuatan

penunjang dan pemukul dari suatu kesatuan dalam menghadapi gangguan Kamtibmas khususnya yang berbentuk kerusuhan massa sangat diperlukan sekali. Oleh karena itu sangat ideal apabila pada tingkat Polsek tersedia minimal 1 Pleton cadangan dan tiap Polres tersedia minimal 1 Kompi pasukan cadangan. Pasukan cadangan ini tidak perlu dinamakan Pasukan Dalmas, cukup dengan nama yang sudah ada yaitu Perintis, Sabhara yang memang kemampuan Dalmas merupakan bagian dari berbagai kemampuan yang dimiliki oleh Perintis dan Sabhara tersebut. Selama ini Polri sering terbawa oleh istilah-istilah Militer yang sebenarnya tidak perlu digunakan.

### **Faktor Ekstern**

Situasi pada era reformasi ini ikut mendorong masyarakat untuk berbuat semauanya tanpa mengindahkan aturan hukum, mereka mudah sekali terpancing dan dihasut oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu kecurigaan yang telah lama mengendap di kalangan masyarakat luas terhadap proses penyidikan terhadap beberapa kasus seperti : kasus Marsinah, kasus Udin, kasus Cece, timbul kesan dari berbagai pihak bahwa ada rekayasa atau pesan sponsor. Akibatnya Polri dinilai tidak

netral dalam penanganan kasus, baik yang bersifat kriminal maupun kasus-kasus kerusuhan akibat konflik antar kelompok dalam masyarakat.

Isu-isu ini sering dikembangkan oleh masyarakat bahwa "Polri tidak Netral dan selalu berpihak kepada penguasa" dalam penanganan konflik di kalangan masyarakat seperti :

#### **Kasus yang bermuatan politik.**

Kasus yang menyangkut reaksi/complain masyarakat terhadap kebijaksanaan pemerintah.

Kasus perselisihan antar masyarakat/buruh dengan majikan/pengusaha.

Maraknya kecenderungan mengeksploitasi HAM secara berlebihan dengan mendramatisir permasalahan menyangkut HAM dan demokrasi untuk menyulut emosi massa dalam mengajukan tuntutan-tuntutan kepada pihak pemerintah, apalagi munculnya kasus-kasus Aceh dan Timor-Timur serta Irian Jaya dimana masyarakat sudah terbentuk opini untuk menghapus DOM dan menarik PPRM dimana Polri sebagai pemegang Kodat daripada PPRM tersebut namun di lapangan. Polri justru banyak yang dikendalikan oleh TNI, akibatnya ikut terkena getahnya karena terkesan seperti operasi

militer dan bukan Operasi Gakum. Mencermati gejala ini perlu kiranya kita mewaspadaai indikasi adanya reaksi massa terhadap Polri yang sengaja direkayasa dalam skala terbatas oleh pihak yang tidak legawa dalam terwujudnya Polri Mandiri.

#### **ESENSI PEMBAHASAN**

Bahwa terjadinya penyerangan terhadap Kantor/Markas Polri oleh masyarakat, selain karena kurangnya masalah pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat karena faktor profesionalisme dan tindakan Polri yang tidak simpatik, juga adanya situasi reformasi dimana masyarakat saat ini mudah terhasut dan terpancing untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum apalagi situasi ekonomi kita yang juga ikut menyuburkan adanya tindakan-tindakan masyarakat yang merusak, menjarah serta perbuatan-perbuatan lainnya yang bertentangan dengan hukum.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab dari uraian diatas ada dua hal yaitu :

#### **Faktor Intern**

- 1) Petugas Polri tidak simpatik dan arogan.
- 2) Lambannya penanganan kasus.

- 3) Kurang profesionalisme
- 4) Lemahnya fungsi Intel dan Bimmas.
- 5) Faktor Kepemimpinan / Komandan satuan.

#### Faktor Ekstern.

- 1) Masyarakat curiga terhadap keberpihakan Polri.
- 2) Maraknya kecenderungan eksploitasi HAM.
- 3) Kurang simpatinya masyarakat terhadap ABRI/TNI.
- 4) Masyarakat mudah terpancing dan termakan isu serta mengabaikan penegakan hukum.

#### LANGKAH TINDAK YANG DISARANKAN

Agar peristiwa-peristiwa ini tidak berulang dan sangat merugikan terhadap citra Polri, maka bertepatan dengan situasi dan kondisi yang menuju kepada Polri Mandiri sudah saatnya kita ingatkan dan tanamkan kembali terutama kepada setiap insan manusia Polri agar selalu ingat kepada :

Love humanity, Help Delinquency and Fight Crime

Kepribadian 3 S (Senyum, Sapa dan Salam).

Harus selalu ingat 7 KAH (Si Adi demen babi) dalam menghadapi kasus/masalah dan usahakan agar mencari serta menemukan akar permasalahan.

Pola pikir dalam menghadapi massa, tidak harus kita berfikir bahwa 200 massa harus dihadapi dengan 600 (3 kali kekuatan) personil guna penyelesaian. Barangkali cukup dengan 5 atau 6 personil saja yang "berbobot" dan berpengaruh terhadap massa tersebut.

Perlu dirumuskan serta ditata kembali secara baik kurikulum pendidikan Polri, sehingga dapat menghasilkan Polri yang tanggap, Tanggon, Trengginas dan simpatik serta disegani/dihargai masyarakat.

Kegiatan-kegiatan tatap muka, komunikasi dan sambang kepada tokoh masyarakat perlu dibuat program yang terarah dan baik sehingga "Kepribadian 3S" melekat pada diri anggota Polri.

Untuk pasukan penindak huru-hara Polri tidak digabung dalam PPRM, karena terkesan seperti operasi militer, sedangkan Polri yang harus dikedepankan adalah "Operasi Gakum" sehingga cukup dengan sebutan "Brimob" yang memang kerusuhan massal termasuk salah satu kemampuan yang dimilikinya.